

# Western Colonialism in the Muslim World: A Historical Analysis of the Forms and Mechanisms of Domination

**Mohammad Ulil Albab Abdalah**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Jawa Timur, Indonesia*  
[mohammadulilalbab007@gmail.com](mailto:mohammadulilalbab007@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: December 16, 2025

Accepted: March 13, 2026

Published: March 14, 2026

DOI : 10.20885/abhats.vol7.iss1.art10  
PP : 113-126

### Keyword:

*Western Colonialism; Muslim World; Colonial Hegemony; Islam–West Relations; Historical Analysis*

## ABSTRACT

This study examines the historical background as well as the forms and mechanisms of Western colonialism in the Muslim world, emphasizing that the decline of Muslim societies should be understood as a historical and structural phenomenon rather than a consequence of Islamic theological teachings. Following the death of the Prophet Muhammad (peace be upon him), the Muslim world experienced significant political dynamics characterized by internal conflicts, the weakening of the caliph authority, and the eventual collapse of major political powers such as the Abbasid and Ottoman empires. These conditions created structural vulnerabilities that enabled the penetration of external powers. At the same time, the stagnation of scientific and intellectual development, along with the decline of political support for scholarly traditions, further limited the capacity of Muslim societies to respond to global transformations. Within this context, European expansion into Muslim territories occurred gradually, beginning with the Reconquista in Andalusia, the Crusades, the maritime expansion of Iberian powers, and eventually the emergence of modern colonialism in the nineteenth and twentieth centuries. This research employs a qualitative method with a historical-critical approach based on library research. The findings indicate that Western colonialism was not limited to military and political domination but also operated through administrative and legal control, economic exploitation, educational and cultural restructuring, and the production of ideological and discursive representations of Islam. These processes ultimately formed a complex and long-term system of colonial hegemony that significantly shaped the political, economic, and intellectual structures of Muslim societies.

# Kolonialisme Barat terhadap Dunia Islam: Analisis Historis atas Bentuk dan Mekanisme Dominasi

## ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji latar belakang historis serta bentuk dan mekanisme kolonialisme Barat terhadap dunia Islam dengan menekankan bahwa kemunduran masyarakat Muslim merupakan fenomena historis dan struktural, bukan akibat dari ajaran teologis Islam. Sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, dunia Islam menghadapi berbagai dinamika politik yang ditandai oleh konflik internal, melemahnya institusi kekhilafahan, serta runtuhnya kekuatan politik besar seperti Dinasti Abbasiyah dan Kesultanan Utsmani. Kondisi tersebut menciptakan kerentanan struktural yang membuka peluang bagi penetrasi kekuatan eksternal. Di sisi lain, stagnasi perkembangan ilmu pengetahuan dan melemahnya dukungan politik terhadap tradisi intelektual turut memperlemah

### Kata kunci:

*Kolonialisme Barat; Islam; Sejarah Kolonialisme; Hegemoni Kolonial; Relasi Islam–Barat*



W : <http://abhats.org>

E : [abhatsjurnal@gmail.com](mailto:abhatsjurnal@gmail.com)

---

kemampuan dunia Islam dalam merespons perubahan global. Dalam konteks tersebut, ekspansi Eropa ke wilayah-wilayah Muslim berlangsung secara bertahap, mulai dari Reconquista di Andalusia, Perang Salib, ekspansi maritim bangsa Iberia, hingga kolonialisme modern pada abad ke-19 dan ke-20. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-kritis berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolonialisme Barat tidak hanya berlangsung melalui dominasi militer dan politik, tetapi juga melalui kontrol administratif dan hukum, eksploitasi ekonomi, rekayasa pendidikan dan budaya, serta produksi wacana ideologis tentang Islam. Proses tersebut membentuk sistem hegemoni kolonial yang berdampak jangka panjang terhadap struktur politik, ekonomi, dan intelektual masyarakat Muslim.

---

## A. PENDAHULUAN

Kolonialisme Barat terhadap dunia Islam merupakan salah satu fenomena historis yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan intelektual masyarakat Muslim hingga masa kontemporer. Sejak periode awal modern, ekspansi kekuatan Eropa ke wilayah-wilayah Muslim tidak hanya mengubah struktur kekuasaan politik, tetapi juga membentuk ulang sistem ekonomi, hukum, dan produksi pengetahuan di berbagai wilayah Islam. Dalam perspektif historiografi, kolonialisme Barat dipahami sebagai proses historis yang panjang, dimulai sejak ekspansi maritim Eropa pada abad ke-15 dan berkembang menjadi kolonialisme modern pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 yang menjangkau kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika Utara, dan Asia Tenggara (Lewis, 2014; Owen, 2013).

Dalam sejumlah kajian sejarah, kolonialisme Barat sering dijelaskan sebagai konsekuensi dari keunggulan militer dan teknologi yang dimiliki oleh negara-negara Eropa pada masa modern awal. Namun, penjelasan semacam ini cenderung mengabaikan dinamika internal dunia Islam yang turut menciptakan kerentanan terhadap penetrasi kekuatan eksternal. Sejumlah sejarawan menunjukkan bahwa sejak akhir periode klasik, dunia Islam mengalami fragmentasi politik, melemahnya otoritas kekhalifahan, serta munculnya konflik internal antar dinasti dan kelompok politik yang pada akhirnya mengurangi kemampuan institusi politik Islam dalam mempertahankan stabilitas kekuasaan (Lapidus, 2014; Hodgson, 1974). Kondisi tersebut menciptakan ruang bagi kekuatan Eropa untuk memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah Muslim pada periode modern.

Selain faktor politik, sejumlah penelitian juga menyoroiti adanya stagnasi dalam perkembangan kelembagaan dan tradisi intelektual di sebagian wilayah dunia Islam pada periode akhir abad pertengahan hingga awal modern. Melemahnya patronase politik terhadap lembaga pendidikan dan tradisi keilmuan menyebabkan berkurangnya dinamika intelektual yang sebelumnya berkembang pesat pada masa keemasan peradaban Islam. Dalam konteks tersebut, sebagian sarjana berpendapat bahwa kemunduran institusi politik dan intelektual di dunia Islam turut mempengaruhi kemampuan masyarakat Muslim dalam merespons perubahan global yang menyertai kebangkitan Eropa pada era modern (Hourani, 1983; Hallaq, 2012).

Di sisi lain, historiografi modern juga menunjukkan bahwa kolonialisme Barat tidak hanya berlangsung melalui penaklukan militer atau dominasi politik semata. Kolonialisme juga beroperasi melalui mekanisme yang lebih kompleks, seperti rekonstruksi sistem hukum,

reorganisasi ekonomi kolonial, intervensi dalam sistem pendidikan, serta produksi pengetahuan tentang dunia Islam melalui tradisi orientalisme. Proses ini membentuk struktur dominasi yang tidak hanya bersifat politik dan ekonomi, tetapi juga kultural dan intelektual, sehingga memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan masyarakat Muslim (Said, 1978; Hallaq, 2012).

Berangkat dari konteks tersebut, artikel ini berupaya menganalisis kolonialisme Barat terhadap dunia Islam sebagai fenomena historis yang bersifat struktural dan multidimensional. Kolonialisme tidak hanya dipahami sebagai ekspansi wilayah atau dominasi militer semata, tetapi juga sebagai proses hegemoni yang berlangsung melalui berbagai mekanisme politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan produksi pengetahuan. Dengan menggunakan pendekatan historis-kritis berbasis studi kepustakaan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang kolonialisme Barat serta mengidentifikasi bentuk dan mekanisme dominasi kolonial yang membentuk struktur sosial-politik dunia Islam pada periode modern.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan desain **studi pustaka (library research)** dan **pendekatan historis-kritis**. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan memahami secara mendalam proses, makna, dan struktur kolonialisme Barat terhadap dunia Islam dalam konteks sejarah dan pemikiran. Pendekatan historis-kritis digunakan untuk menelusuri dinamika hubungan Islam dan Barat secara kronologis serta menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang melatarbelakangi kolonialisme. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu **sumber primer** dan **sumber sekunder**. Sumber primer meliputi karya-karya klasik dan modern yang membahas sejarah politik Islam, kolonialisme, serta relasi Islam dan Barat, baik yang ditulis oleh sarjana Muslim maupun Barat. Sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku teks sejarah, laporan akademik, dan karya-karya teoritik yang relevan dengan tema kolonialisme, imperialisme, dan produksi pengetahuan kolonial. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas akademik, relevansi tema, serta konteks historis yang dibahas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **penelusuran literatur** secara sistematis terhadap buku, jurnal, dan dokumen ilmiah yang berkaitan dengan kemunduran politik Islam, kemandekan ilmu pengetahuan, ekspansi Eropa, serta bentuk-bentuk kolonialisme di dunia Islam. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama penelitian, seperti kolonialisme militer-politik, kolonialisme administratif dan hukum, kolonialisme ekonomi, kolonialisme pendidikan dan budaya, serta kolonialisme ideologis dan diskursif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan **metode deskriptif-analitis** dan **analisis kritis wacana historis**. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis fakta-fakta sejarah dan proses kolonialisme, sedangkan analisis kritis digunakan untuk mengungkap relasi kekuasaan di balik kebijakan kolonial, praktik ekonomi, sistem pendidikan, dan produksi wacana tentang Islam. Dalam tahap ini, data tidak hanya disajikan secara kronologis, tetapi juga dianalisis untuk melihat pola dominasi, hegemoni, serta dampak struktural kolonialisme terhadap dunia Islam.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan **triangulasi sumber**, yakni dengan membandingkan berbagai perspektif dan interpretasi dari sumber yang berbeda, baik dari tradisi keilmuan Islam maupun Barat. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan bias

ideologis dan menghasilkan analisis yang lebih objektif dan komprehensif. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai kolonialisme Barat terhadap dunia Islam sebagai fenomena historis yang kompleks, multidimensional, dan berdampak jangka panjang.

## C. PEMBAHASAN

### Latar Belakang Kolonialisme Terhadap Islam

#### 1. Fragmentasi Politik dalam Dunia Islam

Pasca wafatnya Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, umat Islam mengalami guncangan politik yang cukup signifikan. Kondisi ini ditandai dengan munculnya konflik internal yang dipicu oleh perbedaan pandangan politik dan ideologis di antara umat Islam, yang kemudian melahirkan beberapa kelompok besar seperti Sunni, Syiah, dan Khawarij. Selain itu, konflik juga terjadi antara berbagai kelompok etnis dan mazhab dalam dunia Islam, termasuk persaingan antara kelompok Arab dan Turki. Pada saat yang sama, wilayah-wilayah kekuasaan Islam seperti Andalusia mengalami kemunduran politik yang berujung pada melemahnya kekuatan pemerintahan Islam di kawasan tersebut. Situasi ini semakin diperparah oleh runtuhnya Baghdad akibat serangan bangsa Mongol pada abad ke-13. Dalam perspektif sejarah, Perang Salib sering dipandang sebagai salah satu titik awal meningkatnya intervensi dan dominasi Barat terhadap dunia Islam. Keberhasilan militer bangsa Eropa dalam perang tersebut memberikan keuntungan strategis bagi negara-negara Barat dan turut membuka jalan bagi munculnya ekspansi serta imperialisme Barat di kemudian hari (Ridho1, 2022).

Pada awalnya, persoalan politik dalam umat Islam muncul karena tidak adanya penunjukan langsung mengenai siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat. Tidak adanya petunjuk eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun hadis mengenai mekanisme suksesi kepemimpinan menyebabkan umat Islam menghadapi dilema politik pada masa awal pasca wafatnya Nabi. Dalam situasi tersebut, para sahabat kemudian mengemukakan beberapa ijtihad mengenai kriteria pemimpin yang layak menjadi khalifah. Sebagian berpendapat bahwa khalifah harus berasal dari suku Quraisy, sebagian lainnya berpendapat bahwa kepemimpinan seharusnya berasal dari keturunan Nabi, sementara kelompok lain berpendapat bahwa khalifah dapat berasal dari siapa saja, baik Arab maupun non-Arab, selama ia merupakan seorang Muslim yang memiliki kemampuan memimpin umat. Perbedaan pandangan tersebut kemudian melahirkan tiga kecenderungan politik yang berkembang menjadi kelompok Sunni, Syiah, dan Khawarij (Mindani et al., 2024; Ridho, 2022).

Perkembangan tiga aliran politik tersebut kemudian turut mewarnai dinamika kekuasaan dalam sejarah Islam awal. Perebutan kekuasaan bahkan menimbulkan konflik bersenjata yang menjadi salah satu peristiwa pertumpahan darah pertama dalam sejarah politik umat Islam, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahannya, sejumlah pemberontakan terjadi, di antaranya pemberontakan yang melibatkan Abdullah ibn Zubair, yang kemudian berkaitan dengan peristiwa Perang Jamal, serta konflik politik dengan Muawiyah ibn Abu Sufyan yang berpusat di wilayah Syam. Konflik antara Ali dan Muawiyah pada awalnya merupakan perselisihan politik, namun dalam perkembangannya mengalami perluasan hingga memasuki wilayah perdebatan teologis dan ideologis. Konflik tersebut pada akhirnya diselesaikan melalui mekanisme tahkim (arbitrase) atas usulan Amr ibn al-Ash. Namun demikian, keputusan tahkim tersebut tidak diterima oleh sebagian kelompok yang

kemudian dikenal sebagai Khawarij. Kelompok ini menilai bahwa tahkim bertentangan dengan prinsip hukum dalam Al-Qur'an, sehingga mereka kemudian mengkafirkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses arbitrase tersebut, termasuk Ali, Muawiyah, Amr ibn al-Ash, dan Abu Musa al-Asy'ari, dengan merujuk pada interpretasi terhadap QS. Al-Maidah ayat 44 (Rofiqoh, 2022).

Konflik politik juga terus berlangsung pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Meskipun periode ini sering dikenal sebagai masa Golden Age peradaban Islam karena perkembangan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ekonomi, di sisi lain dinasti ini juga menghadapi berbagai konflik internal yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kemundurannya. Salah satu titik penting terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil, ketika kelemahan kepemimpinan politik membuka peluang bagi kelompok militer Turki untuk memperoleh pengaruh besar dalam pemerintahan. Kondisi ini memicu munculnya berbagai pemberontakan dan fragmentasi kekuasaan, sehingga sejumlah wilayah kekuasaan mulai memisahkan diri dari otoritas pusat Dinasti Abbasiyah.

Secara historis, tanda-tanda kemunduran Dinasti Abbasiyah sebenarnya telah muncul sejak periode awal pemerintahan dinasti tersebut, meskipun pada masa-masa awal masih dapat dikendalikan oleh para khalifah yang kuat. Seiring berjalannya waktu, berbagai faktor mempercepat proses kemunduran tersebut. Beberapa faktor utama yang sering disebutkan antara lain persaingan antarkelompok etnis, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, serta ancaman dari kekuatan eksternal. Selain tekanan dari kekuatan Kristen Eropa yang melancarkan Perang Salib, dunia Islam juga menghadapi serangan besar dari tentara Mongol yang pada akhirnya menghancurkan Baghdad pada tahun 1258. Serangan ini menjadi salah satu peristiwa paling traumatis dalam sejarah politik Islam karena menandai runtuhnya pusat kekuasaan dan intelektual dunia Islam pada masa itu.

## 2. Stagnasi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Kemandekan ilmu pengetahuan Islam pada masa itu masih berkaitan dengan kemunduran politik. Politik sendiri bagi suatu bangsa merupakan kunci penting bagi kekuatan dan kekuasaan. Menurut Crishtoph, politik memang bukan satu-satunya elemen kekuatan negara, tetapi politik merupakan kerangka utama di mana kekuatan itu dimobilisasi dan digunakan (Rohde, 2004). Kemunduran politik umat Islam tentu juga berdampak pada kemunduran aspek-aspek lainnya, salah satunya adalah kemandekan ilmu pengetahuan. Runtuhnya kerajaan-kerajaan besar Islam, penyerangan dari kaum *Kristiani*, serta bangsa Mongol menjadi salah satu faktor kemandekan ilmu pengetahuan Islam (Fuadi & Ulum, 2024). Selain faktor politik kekuasaan, pengaruh filsafat Yunani yang bertolak dari silogisme primer yang mengandung kelemahan kemudian menjadi salah satu sumber pemikiran Islam dan tidak lagi sepenuhnya bersumber dari Al-Qur'an.

Secara garis besar, terdapat dua pola pemikiran yang berkembang dan memiliki pengaruh besar dalam pemikiran umat Islam. Pertama adalah pola pemikiran yang mendasarkan diri pada wahyu, yang kemudian disebut sebagai pemikiran sufistik. Pemikiran ini cenderung menekankan aspek batiniah dan akhlak seseorang. Kedua adalah pemikiran rasional yang lebih menekankan pada peran akal pikiran. Pola yang kedua ini sangat memperhatikan pengembangan intelektual dan penguasaan material (Fuadi & Ulum, 2024). Pada periode klasik, kedua pemikiran ini saling melengkapi. Namun, setelah kemunduran politik dan ketika pemikiran rasional mulai dipengaruhi oleh pemikiran Barat, dunia Islam pun mulai meninggalkan pendekatan tersebut sehingga yang lebih dominan tersisa adalah pemikiran

sufistik. Akibatnya, pemikiran material dan perkembangannya menjadi tertinggal. Generasi setelah *golden age* pada akhirnya tidak mampu menciptakan kreasi-kreasi baru, bahkan mengalami ketidakmampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perubahan dan perkembangan zaman (Fuadi & Ulum, 2024).

### 3. Perubahan Konstelasi Kekuasaan Global

Selain disebabkan oleh konflik politik internal dan kemunduran ilmu pengetahuan, ekspansi Eropa terhadap dunia Islam juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan melemahnya kekuatan politik Islam. Ekspansi Eropa terhadap dunia Islam tidak bermula dari satu peristiwa tunggal, melainkan merupakan rangkaian proses politik, militer, dan maritim yang berlangsung selama beberapa abad. Setelah kelahiran Islam pada abad ke-7, pasukan Muslim dengan cepat menguasai wilayah-wilayah timur dan selatan Mediterania yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Kekaisaran Bizantium dan Persia. Perkembangan ini mengubah peta politik Mediterania dan menempatkan komunitas Kristen Eropa dalam kontak langsung dengan kekuasaan Muslim, suatu kondisi yang kemudian memicu serangkaian respons militer dan kultural dari dunia Kristen (Philips, 2014).

Pada tahun 711 M, pasukan Muslim menyeberangi Gibraltar dan dengan cepat menguasai sebagian besar Semenanjung Iberia. Peristiwa ini kemudian memicu respons panjang dari kerajaan-kerajaan Kristen di wilayah utara melalui proses yang dikenal sebagai *Reconquista*, yang berlangsung selama berabad-abad. *Reconquista* menjadi salah satu fase awal ekspansi Kristen dalam sejarah Eropa. Konflik ini tidak terjadi dalam satu pertempuran tunggal, melainkan melalui proses yang sangat panjang, berlangsung hampir tujuh abad. Pelaku utamanya berasal dari kerajaan-kerajaan Kristen seperti Asturias, Castile, Aragon, Navarre, dan kemudian Spanyol. Sementara itu, pihak yang dihadapi adalah entitas-entitas Muslim di Al-Andalus. Dalam perkembangannya, ideologi konflik tersebut berubah dari sekadar pertahanan wilayah menjadi perang suci Kristen.

Secara simbolik, pertempuran Covadonga pada awal abad ke-8 menandai awal perlawanan Kristen, sementara secara historis penaklukan Granada pada tahun 1492 menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Eropa Barat. *Reconquista* tidak hanya berbentuk konflik militer, tetapi juga melibatkan kolonisasi ulang, rekonstruksi identitas keagamaan, perpindahan penduduk, serta transformasi budaya yang mendalam. Proses ini kemudian menjadi salah satu fondasi awal ekspansi politik dan religius Eropa. Meskipun konflik antara Eropa dan dunia Islam telah berlangsung sejak penaklukan Muslim atas Iberia pada abad ke-8, ekspansi militer Eropa Barat ke wilayah inti dunia Islam secara nyata baru dimulai melalui Perang Salib pada akhir abad ke-11. Perang Salib menandai fase baru dalam sejarah hubungan Eropa dan Islam, yang ditandai oleh mobilisasi lintas benua, legitimasi religius yang terpusat, serta pendirian kekuasaan Kristen di wilayah mayoritas Muslim (Asbridge, 2012).

Sejak akhir abad ke-11, kelompok-kelompok Kristen seperti Norman dari Normandia melakukan penaklukan dan pemerintahan di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Muslim. Ekspansi Eropa pada kenyataannya bukan hanya fenomena yang terjadi di Iberia dan Timur Tengah, tetapi juga meluas di kawasan Mediterania dan melibatkan masyarakat Eropa lokal. Dalam perkembangan selanjutnya, Paus dan para pemimpin politik Kristen di Eropa memobilisasi pasukan untuk merebut kembali situs-situs suci bagi mereka sekaligus memperluas pengaruh Kristen. Perang Salib menjadi titik balik penting karena menandai skala baru ekspedisi lintas laut yang terorganisasi, melibatkan berbagai kekuatan Eropa di wilayah

mayoritas Muslim. Selain konflik militer, proses ini juga membuka jaringan perdagangan, pertukaran budaya, dan transmisi teknologi yang kemudian memperkuat ekspansi Eropa (Lewis, 2014).

Fase kolonialisasi awal dapat dikatakan muncul pada abad ke-15 ketika kerajaan-kerajaan Iberia, seperti Portugal dan Spanyol, mengalihkan energi militer dan politik mereka ke operasi maritim melintasi Selat Gibraltar dan sepanjang pesisir Afrika Utara (Basri et al., 2023). Penaklukan Ceuta pada tahun 1415 oleh Portugal menjadi salah satu penanda penting dalam proses tersebut (Pablo & Escarcena, 2022). Wilayah ini berfungsi sebagai enklaf di Afrika Utara yang menjadi basis peluncuran eksplorasi lebih lanjut, termasuk peran Pangeran Henry dalam mendorong penjelajahan pesisir Afrika. Fase ini disebut sebagai kolonialisasi awal karena mengubah karakter ekspansi Eropa dari serangan yang sebelumnya bersifat religius dan feodal menjadi ekspansi kolonial maritim dan komersial yang secara langsung menghubungkan Eropa dengan dunia Islam di Afrika Utara dan kemudian berlanjut ke Samudra Hindia (Russel, 1995).

Peralihan strategi ekspansi Eropa yang sebelumnya dominan melalui jalur darat kemudian berkembang ke jalur maritim dan lintas samudra (Wardana, 2015). Pada saat yang sama, kekuatan Muslim dari Kesultanan Ottoman juga berkembang pesat di Anatolia dan Balkan. Ottoman menjadi kekuatan Muslim yang secara langsung hadir di kawasan Eropa. Ketika Ottoman berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, peristiwa ini semakin memperkuat posisi politik dan militer dunia Islam sekaligus memengaruhi dinamika hubungan antara Eropa dan Islam. Dalam konteks ini, interaksi antara kedua peradaban menjadi lebih bersifat dua arah (Rulianto & Dokopat, 2021). Bukan hanya Eropa yang melakukan ekspansi ke wilayah Islam, tetapi juga terjadi perpindahan kekuatan dan kontak intens antara kedua peradaban melalui konflik, kompetisi geopolitik, dan pertukaran budaya.

Keruntuhan Kesultanan Ottoman sendiri berlangsung melalui proses yang panjang. Proses ini ditandai oleh stagnasi militer, krisis ekonomi, serta kegagalan reformasi dalam menghadapi modernitas Eropa. Tekanan eksternal berupa ekspansi kolonial Eropa serta munculnya gerakan nasionalisme di wilayah Balkan semakin mempercepat disintegrasi kekaisaran. Pukulan terakhir yang mengakhiri eksistensi politik Ottoman terjadi ketika kekaisaran tersebut mengalami kekalahan dalam Perang Dunia I. Kesultanan Ottoman secara resmi dibubarkan pada tahun 1922 (Azra, 2004; Rulianto & Dokopat, 2021).

Kegagalan Ottoman tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya kekuatan militer, tetapi juga oleh ketidakmampuannya beradaptasi dengan dinamika dunia modern. Runtuhnya Kesultanan Ottoman sering dipandang sebagai simbol puncak kemunduran politik dunia Islam, bukan karena Islam kehilangan daya ajarannya, melainkan karena institusi politik Islam gagal menyesuaikan diri dengan perubahan struktur global modern. Melemahnya Ottoman menyebabkan hilangnya pelindung geopolitik dunia Islam, membuka jalan bagi kolonialisme Eropa, serta mempercepat fragmentasi politik dan keteringgalan ekonomi. Dengan demikian, kemunduran dunia Islam lebih bersifat historis-struktural daripada teologis.

### **Bentuk dan Proses Kolonialisme di Dunia Islam**

Kolonialisme Barat atas dunia Islam tidak berlangsung secara tunggal, melainkan melalui beragam bentuk dan tahapan proses yang disesuaikan dengan kondisi politik, sosial, dan ekonomi masing-masing wilayah. Secara umum, kolonialisme di dunia Islam dapat dipahami melalui tiga bentuk utama, yaitu kolonialisme militer-politik, kolonialisme ekonomi, dan kolonialisme kultural-intelektual. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk struktur dominasi

kolonial yang berlapis. Berikut penjelasan mengenai bagaimana kolonialisme tersebut terjadi di berbagai wilayah dunia Islam.

#### 1. Kolonialisme Militer dan Politik

Penaklukan militer merupakan bentuk kolonialisasi paling awal yang kemudian diikuti dengan penghapusan kedaulatan politik Islam. Di banyak wilayah dunia Islam, kekuatan Barat menundukkan kerajaan atau kesultanan Muslim dan menggantikannya dengan pemerintahan kolonial. Hal ini dapat dilihat, misalnya, di India ketika Inggris secara bertahap menghancurkan Kesultanan Mughal dan secara resmi mengambil alih kekuasaan setelah Pemberontakan India tahun 1857. Sejak saat itu, umat Islam kehilangan posisi politik dominan yang sebelumnya mereka miliki selama berabad-abad (Rogan, 2015). Di Timur Tengah, Inggris dan Prancis kemudian membagi wilayah Arab melalui sistem mandat, seperti di Irak, Palestina, dan Suriah. Pembagian ini mengakhiri kekuasaan politik Islam yang sebelumnya terpusat di wilayah tersebut (Halik et al., 2024). Di Indonesia, Belanda juga melakukan kolonialisasi dengan menundukkan satu per satu kesultanan Islam, seperti Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram, melalui kekuatan militer serta perjanjian politik yang tidak seimbang. Kolonialisme militer-politik ini bertujuan menghancurkan struktur kekuasaan Islam lokal agar tidak lagi mampu menjadi pusat perlawanan terhadap kekuasaan kolonial (Aizid, 2025).

#### 2. Kolonialisme Administratif dan Hukum

Setelah wilayah Islam ditaklukkan, kolonialisme berlanjut melalui rekayasa administratif dan hukum. Sistem hukum Islam secara bertahap digantikan atau dipinggirkan oleh sistem hukum kolonial. Sebagai contoh, pada abad ke-18 hingga ke-19 di India berkembang sistem hukum yang dikenal sebagai *Anglo-Muhammadan Law*, yaitu versi hukum Islam yang telah dikodifikasi, diseleksi, dan diinterpretasikan ulang oleh hakim-hakim kolonial Inggris. Beberapa aspek hukum Islam yang masih dipertahankan antara lain berkaitan dengan pernikahan, perceraian, warisan, dan wakaf. Sementara itu, bidang lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, dan hukum ekonomi publik tidak lagi menggunakan hukum Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam mengalami penurunan status, dari sistem hukum publik menjadi hukum privat (Hallaq, 2012; Vikør, 2004).

Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik hukum dualistik. Dalam sistem ini, hukum Islam diperbolehkan secara terbatas pada urusan ibadah dan hukum keluarga, sementara hukum kolonial menguasai bidang pidana, administrasi, dan ekonomi publik. Meskipun kebijakan ini sering dibingkai sebagai bentuk toleransi terhadap praktik keagamaan lokal, tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan potensi kekuatan politik Islam agar tidak berkembang menjadi kekuatan oposisi terhadap kekuasaan kolonial (Hallaq, 2012). Contoh konkret dapat dilihat di Aceh. Sebelum masa kolonial, Kerajaan Aceh memiliki sistem hukum yang menempatkan *qadi* sebagai otoritas peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum fikih, termasuk dalam perkara *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. Namun setelah kolonialisme Belanda diberlakukan, sistem hukum tersebut digantikan oleh *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Hindia Belanda) yang diberlakukan bagi seluruh penduduk, termasuk umat Islam. Akibatnya, kasus-kasus seperti pencurian yang dalam hukum Islam memiliki sanksi tertentu digantikan dengan ketentuan pidana kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam secara praktis dihapuskan dari sistem hukum publik pada masa kolonial (Aizid, 2025; Hallaq, 2012; Musliati et al., 2023).

### 3. Kolonialisme Ekonomi

Penguasaan sumber daya dan penciptaan ketergantungan ekonomi menjadi salah satu motif utama kolonialisme Eropa terhadap dunia Islam. Salah satu contoh dapat dilihat pada tahun 1882 ketika Inggris menguasai Mesir. Produksi kapas di Mesir kemudian diarahkan hampir sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan industri tekstil Inggris di Lancashire. Para petani Mesir dipaksa menanam kapas dan meninggalkan tanaman pangan. Infrastruktur yang dibangun pun bukan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan untuk mendukung kegiatan ekspor. Akibatnya, Mesir pada masa itu mengalami krisis pangan yang serius. Ketergantungan ekonomi terhadap Inggris semakin meningkat, disertai dengan meningkatnya utang negara (Vatikiotis, 1991). Pembangunan Terusan Suez juga menjadi salah satu simbol kolonialisme Barat di Mesir. Ribuan petani Mesir dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi dengan upah yang sangat rendah (Basri et al., 2023; Marsot, 1984; Owen, 2013). Di wilayah Kesultanan Ottoman dan kawasan Arab lainnya, kebijakan perdagangan yang memberikan tarif rendah bagi barang-barang Eropa menyebabkan industri lokal tidak mampu bersaing dan mengalami kemunduran (Pamuk, 1987).

Jika di Mesir terjadi eksploitasi ekonomi melalui produksi kapas untuk industri Lancashire, di Indonesia praktik serupa terlihat melalui kebijakan Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa). Sejak tahun 1830, petani pribumi diwajibkan menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila yang hasilnya kemudian dijual kepada pemerintah kolonial Belanda dengan harga yang ditentukan secara sepihak. Kebijakan ini menyebabkan para petani kehilangan lahan untuk tanaman pangan, sehingga memicu berbagai peristiwa kelaparan di kalangan rakyat pribumi. Sementara itu, Belanda memperoleh keuntungan ekonomi yang sangat besar. Dalam sistem ini, Indonesia berfungsi sebagai pemasok bahan mentah bagi industri di Eropa (Elson R. E., 2008). Selain itu, praktik kerja paksa seperti romusha juga menjadi bagian dari eksploitasi ekonomi pada masa kolonial, khususnya pada masa pendudukan Jepang. Para pekerja dipaksa bekerja dengan upah yang sangat rendah dan dalam kondisi yang buruk. Sebagian besar pekerja berasal dari kalangan rakyat Muslim yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dan dieksploitasi demi kepentingan ekonomi kolonial (Furnivall, 2010; Ricklefs, 1992).

Di India, kehancuran industri tekstil juga menjadi contoh penting kolonialisme ekonomi Inggris. Sebelum kolonialisme Inggris, India merupakan salah satu produsen tekstil terbesar di dunia dan mengekspor kain ke berbagai wilayah, termasuk Eropa. Namun setelah Inggris menguasai India, kebijakan ekonomi kolonial diberlakukan secara sepihak (Chandra et al., 2016). Pemerintah kolonial menerapkan pajak tinggi terhadap tekstil lokal sekaligus membanjiri pasar India dengan produk tekstil dari pabrik-pabrik Inggris. Akibatnya, India yang sebelumnya berperan sebagai produsen berubah menjadi pasar konsumsi bagi produk industri Inggris. Selain industri tekstil, eksploitasi juga terjadi di sektor perkebunan dan pertambangan. Banyak buruh Muslim bekerja di perkebunan teh dan tambang batu bara dengan jam kerja yang panjang serta upah yang rendah. Dalam sistem ini, Inggris memperoleh bahan mentah dengan harga murah sekaligus menekan biaya produksi industri mereka (D. & Metcalf, 2006; Habib, 1995).

### 4. Kolonialisme Pendidikan dan Budaya

Kolonialisme Barat tidak hanya terbatas pada penguasaan wilayah dan eksploitasi ekonomi, tetapi juga meluas ke bidang pendidikan sebagai strategi jangka panjang untuk menciptakan elite lokal yang loyal terhadap kekuasaan kolonial. Pendidikan menjadi instrumen utama dalam kolonialisme kultural. Di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda menjadikan

sistem pendidikan sebagai sarana untuk mencetak elite birokrasi kolonial. Sekolah-sekolah Belanda seperti ELS (*Europeesche Lagere School*), HBS (*Hogere Burgerschool*), dan OSVIA (*Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren*) didirikan untuk tujuan tersebut (Azra, 2004; Ricklefs, 1992). OSVIA secara khusus dirancang untuk mendidik calon pejabat pribumi yang akan bekerja dalam administrasi kolonial. Kurikulum yang diajarkan menekankan bahasa Belanda, sejarah dan budaya Eropa, serta administrasi pemerintahan kolonial. Pendidikan Islam tidak diajarkan secara signifikan di sekolah-sekolah tersebut atau hanya diposisikan sebagai pengetahuan budaya. Sementara itu, tradisi pendidikan pesantren sering dipandang sebagai terbelakang, tidak ilmiah, dan tidak produktif secara ekonomi sehingga tidak memperoleh dukungan dari pemerintah kolonial (Azra, 2004; Hallaq, 2012).

Di India, kebijakan pendidikan kolonial Inggris juga menunjukkan pola yang serupa. Salah satu contoh penting adalah kebijakan pendidikan yang dirumuskan dalam *Minute on Indian Education* (1835) oleh Thomas Babington Macaulay. Tujuan pendidikan kolonial tersebut secara eksplisit adalah “*to form a class who may be interpreters between us and the millions we govern.*” Kebijakan ini menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa utama pendidikan, menggantikan bahasa Arab dan Persia yang sebelumnya digunakan dalam administrasi Kesultanan Mughal (D. & Metcalf, 2006). Dalam situasi ini, madrasah Islam mulai kehilangan patronase negara dan sering dipandang sebagai lembaga pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan modern. Akibatnya, muncul kelompok elite Muslim yang terdidik dalam sistem pendidikan Inggris tetapi semakin jauh dari tradisi keilmuan Islam seperti fikih dan *ulum al-din*. Selain itu, banyak madrasah tradisional kehilangan dukungan dana wakaf dan sering dipandang tidak rasional oleh perspektif kolonial yang menilai ilmu Barat lebih unggul dibandingkan ilmu Islam (Azra, 2004; D. & Metcalf, 2006).

Di Mesir, proses modernisasi pendidikan juga memperlihatkan pengaruh kuat model pendidikan Barat. Sejak masa pemerintahan Muhammad Ali Pasha, berbagai sekolah modern seperti sekolah teknik dan militer mulai diperkenalkan. Dalam perkembangan berikutnya, terjadi pemisahan antara lembaga pendidikan agama seperti Al-Azhar dan lembaga pendidikan modern yang mengajarkan ilmu administrasi, ilmu negara, serta ilmu teknis. Dalam sistem ini, negara cenderung lebih menghargai lulusan sekolah modern dibandingkan dengan ulama tradisional. Akibatnya, ulama semakin tersisih dari proses pengambilan keputusan politik dan administratif. Fenomena ini melahirkan dualisme pendidikan yang memisahkan antara pendidikan Islam tradisional dan pendidikan modern. Pendidikan Islam lebih berfokus pada fikih dan praktik ibadah, sementara pendidikan modern menguasai bidang administrasi dan kenegaraan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berkontribusi pada munculnya elite sekuler yang terdidik secara modern tetapi memiliki jarak dengan tradisi intelektual Islam (Hourani, 1983; Marsot, 1984).

Secara keseluruhan, kolonialisme Barat membentuk cara berpikir masyarakat Muslim melalui sistem pendidikan dengan memperkenalkan sekolah-sekolah modern yang bertujuan mencetak elite lokal yang loyal terhadap kekuasaan kolonial. Pendidikan Islam tradisional secara bertahap dipinggirkan dan sering dilabeli sebagai sistem pendidikan yang terbelakang. Kondisi ini melahirkan dualisme pendidikan antara sistem Barat dan sistem Islam. Akibatnya muncul elite Muslim terdidik Barat yang terasing dari tradisi keilmuan Islam, sebuah kondisi yang memiliki dampak jangka panjang terhadap relasi antara Islam, negara, dan perkembangan pengetahuan di dunia Muslim.

### 5. Kolonialisme Ideologis dan Diskursif

Kolonialisme juga berlangsung melalui produksi pengetahuan dan pembentukan wacana tentang dunia Islam, baik melalui tulisan ilmiah, laporan administrasi kolonial, karya sastra, maupun kebijakan pendidikan. Ekspansi pada tahap ini membentuk gambaran tertentu tentang Islam yang berfungsi untuk melegitimasi dominasi kolonial. Bentuk kolonialisme semacam ini sering disebut sebagai kolonialisme ideologis dan diskursif (Hallaq, 2012). Melalui proses tersebut, sebagaimana Barat membentuk sistem pendidikan yang mengubah kurikulum ajaran Islam serta membatasi peran hukum dan administrasi Islam, muncul pula konstruksi ideologis baru mengenai agama Islam (Herman et al., 2024). Dalam wacana kolonial, Islam sering digambarkan sebagai agama yang tidak rasional, dengan teks-teks keagamaan yang dianggap kuno dan tidak kompatibel dengan konsep *modern law*. Dalam kerangka ini, kolonialisme dipresentasikan seolah-olah sebagai kekuatan yang membawa kemajuan dan modernitas bagi masyarakat Muslim. Salah satu contoh dapat dilihat pada cara pemerintah kolonial memaknai perlawanan umat Islam di Aceh. Perlawanan tersebut sering dilabeli sebagai pemberontakan agama, sementara konsep jihad dipandang sebagai ancaman ekstremisme. Dengan demikian, penjajahan diposisikan sebagai tindakan yang bermoral dan beradab, sedangkan perlawanan kaum Muslim digambarkan sebagai bentuk fanatisme atau bahkan terorisme (Herman et al., 2024; Ricklefs, 1992).

### D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolonialisme Barat di wilayah-wilayah Islam tidak berlangsung sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai proses historis yang bersifat struktural. Proses tersebut terbentuk melalui pertautan antara krisis internal umat Islam dan menguatnya ekspansi kekuatan Barat. Fragmentasi politik, melemahnya institusi kekuasaan, serta stagnasi tradisi keilmuan menciptakan ruang yang memungkinkan kolonialisme berkembang dan mengakar secara efektif. Dominasi kolonial tidak terbatas pada penaklukan militer maupun pengendalian politik semata. Kolonialisme juga beroperasi melalui penguasaan sistem hukum, pengorganisasian ekonomi, intervensi dalam bidang pendidikan, serta produksi wacana tentang Islam. Konsekuensi dari proses tersebut tampak dalam hilangnya kedaulatan politik, munculnya ketergantungan ekonomi, terpinggirkannya hukum Islam dari ruang publik, serta terbentuknya kerangka berpikir hegemonik yang memosisikan Islam sebagai entitas yang inferior dalam narasi modernitas.

### E. REFERENSI

- Azid, R. (2025). Sejarah lengkap kolonial di Nusantara: Portugis, VOC, Hindia Belanda, dan Inggris. IRCiSoD.
- Asbridge, T. (2012). *The crusades: The war for the Holy Land*. Simon & Schuster.
- Azra, A. (2004). *The origins of Islamic reformism in Southeast Asia*. University of Hawaii Press.
- Basri, M., Surodipo, B., Fadillah, N., & Simbolon, N. (2023). Penjajahan Barat atas dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 19–24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10459157>
- Chandra, B., Mukherjee, M., Mukherjee, A., Panikkar, K. N., & Mahajan, S. (2016). *India's struggle for independence*. Penguin UK.
- Metcalf, B. D., & Metcalf, T. R. (2006). *A concise history of modern India*. Cambridge University Press.

- Elson, R. E. (2008). *The idea of Indonesia*. Serambi.
- Fuadi, F., & Ulum, M. (2024). Otoritarianisme dan kemandekan falsafah di dunia Islam: Peran Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam patronase ulama-negara dan pengaruhnya terhadap kemandekan tradisi falsafah di dunia Islam. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 5(1), 23–35. <https://doi.org/10.20885/abhats.vol5.iss1.art2>
- Furnivall, J. S. (2010). *Netherlands India: A study of plural economy*. Cambridge University Press.
- Habib, I. (1995). The eighteenth century in Indian economic history. *Proceedings of the Indian History Congress*, 358–378. <http://www.jstor.org/stable/44158638>
- Halik, A. C., Hasaruddin, H., & Susmihara, S. (2024). Dampak kolonialisme Barat terhadap dunia Islam pada abad ke-17 hingga ke-19: Analisis sejarah dan implikasi kontemporer. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5304–5314. <https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/5134>
- Hallaq, W. B. (2012). *The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament*. Columbia University Press.
- Herman, H., Dahlan, M., & Rahmawati, R. (2024). Penjajahan Barat dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1), 532–539. <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.2045>
- Hourani, A. (1983). *Arabic thought in the liberal age 1798–1939*. Cambridge University Press.
- Lapidus, I. M. (2014). *A history of Islamic societies* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Lewis, B. (2014). *What went wrong? Western impact and Middle Eastern response*. Oxford University Press.
- Marsot, A. L. S. (1984). *Egypt in the reign of Muhammad Ali*. Cambridge University Press
- Mindani, I., Revaldo, P., Hidayat, S., Nadia, R., & Khadafi, M. (2024). Kemunduran peradaban Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 4, 162–169. <https://doi.org/10.69775/jpia.v4i2.196>
- Musliati, A., Aulia, C., & Erwinsyah. (2023). Perkembangan sosial masyarakat pada masa penjajahan. *TIPS: Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(2), 104–116. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tips>
- Owen, R. (2013). *State, power and politics in the making of the modern Middle East*. Taylor & Francis.
- Pablo, J., & Escarcena, A. (2022). Ceuta: The humanitarian and the fortress Europe. *Antipode*, 54(1), 64–85. <https://doi.org/10.1111/anti.12758>
- Pamuk, S. (1987). *The Ottoman Empire and European capitalism, 1820–1913: Trade, investment and production*. Cambridge University Press.
- Phillips, J. (2014). *The crusades*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315798219>
- Ricklefs, M. C. (1992). *A history of modern Indonesia since c. 1200*. Palgrave Macmillan.
- Ridho, M. M. A. (2022). Disintegrasi politik dalam Islam. *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, 92–112. <https://doi.org/10.52166/darelilmi.v9i1.3151>
- Rofiqoh, M. (2022). Dinasti Fatimiyyah: Sejarah dan perkembangan peradaban Islam di Mesir. *Comserva: Indonesian Journal of Community Services and Development*, 1(9), 565–576. <https://doi.org/10.59141/comserva.v1i9.118>
- Rogan, E. (2015). *The fall of the Ottomans: The Great War in the Middle East*. Penguin Books.
- Rohde, C. (2004). *Hans J. Morgenthau und der weltpolitische Realismus*. Nomos.
- Rulianto, R., & Dokopat, A. (2021). Pengaruh penaklukan Konstantinopel terhadap kemajuan Turki Usmani tahun 1453 (kajian politik ekspansi Sultan Muhammad Al-Fatih). *Sindang: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 3(1). <https://doi.org/10.31540/sindang.v3i1.1063>



Russell, P. E. (1995). Prince Henry “the Navigator”: A life. Yale University Press.

Vatikiotis, P. J. (1991). The history of modern Egypt. Weidenfeld & Nicolson.

Vikør, K. S. (2004). Islamic law in the modern world. Routledge.

Wardana, W. Y. (2015). Sejarah bangsa-bangsa Eropa dari masa ke masa.

